



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI  
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI  
3. NHK : 432299

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.325.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/90 m2 di BANTUL, WARISAN  
Rp. 200.000.000
- Tanah Seluas 4242 m2 di KOTA PADANG , WARISAN Rp.  
100.000.000
- Tanah Seluas 215 m2 di KOTA PADANG , WARISAN Rp.  
200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 777 m2/200 m2 di GUNUNG KIDUL,  
HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/90 m2 di BANTUL, HASIL  
SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 26.000.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI  
Rp. 23.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 3.490.200

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.354.490.200

**III. HUTANG**

Rp. 477.575.275

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 876.914.925

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.